



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YANYAN RUSYANDI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 212547

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **820.400.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m²/84 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 135.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/150 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah Seluas 2400 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 20.250.000
4. Tanah Seluas 1986 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 18.250.000
5. Tanah Seluas 1004 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
6. Tanah Seluas 813 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 9.750.000
7. Tanah Seluas 1553 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 14.150.000
8. Tanah Seluas 2764 m² di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000
9. Tanah Seluas 75 m² di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
10. Tanah Seluas 148 m² di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 296.800.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, SUZUKI NEX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000
3. MOBIL, VOLKSWAGEN POLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.600.000
5. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 121.825.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 40.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 51.200.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.330.225.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.330.225.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.